Analisis Yuridis Rehabilitasi Rawat Jalan Narkotika Pelayanan Swasta

Mochammad Rifky Setiawan¹

¹Hukum, Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Jl. Cihampelas No. 8, Kota Bandung, 40116

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: mochammadrifkys7325@gmail.com

Abstract

The research in this article aims to describe the juridical analysis of the implementation of the outpatient rehabilitation service program at the Sekar Mawar Drug Rehabilitation Foundation, and government limitations in the outpatient rehabilitation service, that is whether it runs effectively and efficiently for the recovery process for narcotics addicts and victims of narcotics abuse so that their quality of life improves after undergoing the service program. This research uses an empirical juridical analysis method with primary data sources through interviews and direct observation and secondary data sources through literature study. The results of the research conducted explain that the implementation of the outpatient rehabilitation program at the Sekar Mawar Drug Rehabilitation Foundation which is a private service rehabilitation run by existing laws and regulations and runs effectively and efficiently so that patients recover a state of carrying out daily activities and their quality of life increases, the limitations of the government in outpatient rehabilitation service programs can be overcome by synergizing with local governments, villages and involving student elements that instill the value of the tri dharma of higher education, namely community service. In organizing the outpatient rehabilitation service program, the rehabilitation foundation must consider the evidence base so that it can provide effectiveness and efficiency in the provision of outpatient rehabilitation services.

Keyword: *Effective; Efficient; Narcotics; Outpatient Rehabilitation*

Abstrak

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk memaparkan analisis yuridis penyelenggaraan program layanan rehabilitasi rawat jalan pada Yayasan Rehabilitasi Narkoba Sekar Mawar, dan keterbatasan pemerintah dalam program layanan rehabilitasi rawat jalan yaitu apakah efektif dan efisien dalam proses pemulihan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga kualitas hidupnya meningkat setelah menjalani program layanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis empiris dengan sumber data primer melalui wawancara dan observasi langsung dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan memaparkan bahwa penyelenggaraan program rehabilitasi rawat jalan pada Yayasan Rehabilitasi Narkoba Sekar Mawar yang merupakan rehabilitasi pelayanan swasta berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga pasien pulih dalam keadaan menjalankan aktivitas sehari-hari dan kualitas hidupnya meningkat, keterbatasan pemerintah dalam program layanan rehabilitasi rawat jalan dapat teratasi dengan cara bersinergitas dengan pemerintah daerah, desa dan melibatkan unsur mahasiswa yang menanamkan nilai tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian terhadap masyarakat. Dalam penyelenggaraan program layanan rehabilitasi rawat

jalan yayasan rehabilitasi wajib mempertimbangkan berdasarkan evidence base sehingga dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi rawat jalan.

Kata kunci: Efektif; Efisien; Narkotika; Rehabilitasi Rawat Jalan

PENDAHULUAN

Rehabilitasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu “re-“ memiliki arti “kembali” dan “habilitas” memiliki arti “kemampuan” atau “keterampilan” sehingga rehabilitasi adalah strategi upaya untuk memulihkan seseorang yang mengidap penyakit berat secara psikologis dan sosial kepada kondisi semula (Husmiati, 2020). Rehabilitasi yang dilakukan tergantung pada apa yang diderita oleh pasien atau klien namun mayoritas pasien atau klien yang terdapat dalam rehabilitasi mengalami kecanduan zat adiktif yang disebabkan oleh narkotika (Hidayah et al., 2023). Dalam proses rehabilitasi memulihkan penyakit berat secara psikologis dan sosial merupakan kegiatan yang sulit untuk dilakukan karena fungsi vital dalam proses rehabilitasi, kondisi tersebut menjadi perhatian khusus dalam proses rehabilitasi agar dapat memulihkan pasien dari dominasi yang kuat akan keinginan kembali mengkonsumsi narkotika atau menghilangkan rasa sakau untuk mengkonsumsi kembali narkotika (Hidayatun & Widowaty, 2020). Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan aturan tersebut setiap orang pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan proses tahap awal pemulihan agar dapat melepas pemakai dari ketergantungan terhadap narkotika, rehabilitasi melewati beberapa proses tahapan, tahap awal yaitu rehabilitasi medis atau disebut detoksifikasi yang merupakan metode bagi pemakai untuk memutuskan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan

petunjuk dokter agar menurunkan indikasi pemutus zat (sakau), kemudian dilanjutkan pada rehabilitasi non-medis melalui beragam agenda kegiatan di ruang rehabilitasi, dan proses tahap terakhir atau *after care* yaitu memusatkan aktivitas bekerja berlandaskan pada minat dan bakat yang nantinya dapat beradaptasi kembali di tengah-tengah masyarakat (Hidayah et al., 2023).

Berpacu terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain, efektifitas dari rehabilitasi rawat jalan pelayanan swasta yang dilakukan oleh para mantan pecandu dan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari kualitas hidupnya memiliki peningkatan ketika sebelum mengikuti rehabilitasi rawat jalan dan setelah mengikuti rehabilitasi rawat jalan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa para mantan pecandu dan penyalahgunaan narkotika memiliki peningkatan kualitas hidup yang signifikan ditinjau dari segi dimensi psikologis, fisik, hubungan sosial dan lingkungan (Asmawati et al., 2024). Parameter yang menjadikan keberhasilan dari kualitas pelayanan rehabilitasi rawat jalan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan yayasan atau lembaga rehabilitasi narkotika pelayanan swasta adalah kepuasan masyarakat, kepuasan masyarakat menjadi parameter utama untuk melihat keberhasilan program rehabilitasi rawat jalan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan yayasan atau lembaga rehabilitasi narkotika pelayanan swasta, pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan

“Penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.”, dengan demikian tiap penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi rawat jalan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan yayasan atau lembaga rehabilitasi narkotika pelayanan swasta wajib melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberhasilan pelayanan rehabilitasi rawat jalan yang efektif dan efisien sehingga meningkatkan kualitas hidup para mantan pecandu dan penyalahgunaan narkotika (Aulianita, 2022).

Dibalik program rehabilitasi rawat jalan yang berhasil dengan menekankan efektif dan efisien dalam pelayanan, dalam praktiknya sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penulis lain, masih adanya permasalahan yang kompleks dari segi dimensi kualitas hidup yang cakupannya sangat luas meliputi kesehatan fisik, status psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial dan lingkungan (Herawati, 2023). Pada tingkat global jumlah korban penyalahgunaan narkotika mencapai 296 juta jiwa meningkat 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tingkat nasional jumlah kasus narkotika pada tahun 2023 sebesar 2.464 jika dikomparasi dengan tahun 2024 pada bulan Januari terdapat kasus narkotika sebesar 3.873, pada tingkat provinsi terkhususnya Jawa Barat pada tahun 2023 bulan Desember jumlah kasus narkotika sebesar 178 dikomparasikan dengan tahun 2024 bulan Januari terdapat kasus narkotika sebesar 216, hal tersebut menandakan bahwa tiap bulan kuantitas kejahatan yang dilakukan melalui sekelompok orang meningkat akibat dari kenakalan remaja yang mengacu kepada aktivitas kriminal, didorong dengan *Disruption Era* dan *Society 5.0 Era* (Tanjung & Aulia, 2025). Politik hukum narkotika memiliki tujuan utama untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan agar dilakukan upaya lebih keras untuk menghentikan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang merugikan hingga merenggut nyawa para pecandu dan

penyalahgunaan narkotika hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”, dengan sanksi yang termaktub dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, Pasal 127 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”, dan Pasal 127 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.” (Nurbaliza et al., 2024).

Dengan permasalahan kompleks dalam program rehabilitasi rawat jalan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika setiap bulannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) masih tidak memberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan yang optimal, efektif dan efisien sehingga para pecandu dan penyalahgunaan narkotika tidak menyelesaikan program hingga akhir (*Drop Out*) yang mengakibatkan berbagai masalah dari segi dimensi psikologis, fisik, hubungan sosial, lingkungan, keuangan dan hukum (Wanda Utanty & Ayuning Atmasari, 2024). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis lain, kejadian *Drop Out* terbanyak terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat terutama rehabilitasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) kawasan Jawa Barat, faktor yang menyebabkan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika *Drop Out* adalah demografis, kurangnya dukungan yang diberikan terhadap pemulihan yang dijalani, motivasi yang berubah-ubah dalam menjalani pemulihan dan keyakinan terhadap program

pemulihan yang dijalani (Mirianty, 2021). Hasil dari peninjauan yang dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu mengenai rehabilitasi rawat jalan yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) masih belum optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika *Drop Out* dan lebih memilih untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan pada yayasan atau lembaga rehabilitasi narkotika pelayanan swasta, melihat kejadian tersebut politik hukum narkotika memiliki peran penting sebagai fasilitator Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bekerja sama dengan yayasan atau lembaga rehabilitasi narkotika pelayanan swasta dalam mencapai keberhasilan dan kepuasan terhadap program rehabilitasi rawat jalan, sehingga faktor-faktor yang menjadi keluhan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika terminimalisir dan mengikuti pemulihan hingga tahap akhir (Rizki, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyelenggaraan program layanan rehabilitasi rawat jalan oleh lembaga rehabilitasi narkotika pelayanan swasta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan program rehabilitasi rawat jalan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis empiris untuk mengkaji mengenai proses rehabilitasi rawat jalan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang seyogianya ditempatkan pada rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) namun dialihkan kepada rehabilitasi pelayanan swasta dengan dalih pelayanan swasta merupakan unsur pelengkap yang memiliki rehabilitasi rawat jalan yang efektif dan efisien. Penelitian menggunakan sumber dari bahan hukum primer dan sekunder, sumber data primer menggunakan metode kualitatif melalui wawancara kepada perwakilan dari Yayasan Panti Rehabilitasi Narkotika Sekar Mawar bapak Bambang yang dilakukan 2 (dua)

kali dalam seminggu dan pasien penyalahgunaan narkotika mas AI (inisial) yang dilakukan 4 (kali) dalam seminggu serta observasi langsung di lingkungan Yayasan Panti Rehabilitasi Narkotika Sekar Mawar selama 1 (satu) bulan dengan kehadiran 3 (tiga) kali dalam seminggu serta sumber data sekunder menggunakan metode studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau artikel hukum, dan lain-lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Rehabilitasi Rawat Jalan.

Rehabilitasi rawat jalan belakangan ini menjadi pembahasan yang krusial karena permasalahan yang dilihat oleh khalayak umum adalah apakah ketika rehabilitasi rawat jalan diselenggarakan akan berjalan dengan efektif sebagai bentuk penanggulangan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, pandangan masyarakat terhadap program layanan rehabilitasi rawat jalan berbeda-beda tergantung kepada kondisi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang ketika diarahkan untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan terkadang tidak selesai hingga akhir karena datangnya permasalahan baru, dengan adanya permasalahan baru tersebut pada akhirnya menimbulkan stress yang tidak terkontrol oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga kecanduan terhadap narkotika tidak dapat ditahan yang pada akhirnya membeli dan menggunakan kembali narkotika yang membuat rehabilitasi rawat jalan yang dijalani menjadi tidak efektif dan sulit untuk ditangani oleh yayasan panti rehabilitasi narkotika. Dengan kejadian tersebut rehabilitasi klinik pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan yayasan panti rehabilitasi narkotika tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut karena rehabilitasi yang dijalani oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi rawat jalan yang dijalani secara bebas tidak terikat atau bahkan dipantau secara langsung oleh yayasan panti rehabilitasi

narkotika, dengan begitu penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan yang akan diselenggarakan oleh lembaga manapun wajib memperhatikan efektivitas dan efisiensi berdasarkan *evidence base* (berdasarkan bukti) yang telah diteliti, sehingga penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika agar cepat membaik secara fisik maupun psikologis (Fajar, 2022).

Penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan bagi pasien pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan secara tatap muka (luring) atau media elektronik (daring) dengan pertemuan yang dilakukan selama 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) kali pertemuan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan, diberikan sejak penilaian dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan hasil rencana terapi atau mengikuti kebutuhan pasien sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Bambang selaku Kepala Rumah Tangga Yayasan:

“Rehabilitasi rawat jalan itu pelayanan yang bisa dilakukan secara datang langsung atau melalui online, pertemuan yang dilakukan itu empat kali dalam sebulan atau bisa dua belas kali dalam tiga bulan. Namun, bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasien.”

Dalam mengikuti program rehabilitasi rawat jalan, pasien akan diberikan beberapa tahapan pelayanan yang akan diuji sesuai dengan tingkat keparahan dari efek penggunaan narkotika yang dikonsumsi. Layanan rehabilitasi rawat jalan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Awal Penerimaan Pasien.

Tahapan ini adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pasien untuk mengikuti program rehabilitasi rawat jalan ke Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba Sekar Mawar, pasien yang diterima dibagi menjadi dua jenis yaitu berdasarkan sukarela dan berdasarkan perintah atau putusan hukum, keduanya diterima sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh bapak Bambang selaku Kepala Rumah Tangga Yayasan:

“Pertama-tama kalau ada pasien yang pengen rehabilitasi wajib datang dan daftar terlebih dahulu, pendaftaran disini dibagi jadi dua yang pertama itu yang sukarela kalau yang kedua itu berdasarkan putusan hukum atau rujukan dari aparat penegak hukum.”

Mas AI menjelaskan awal mula dirinya mengikuti program rehabilitasi dengan mendaftar di Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba Sekar Mawar:

“Sebelum saya rehab kebetulan saya terciduk sedang memakai oleh aparat penegak hukum jadi saya dirujuk atau diarahkan untuk mengikuti rehab di yayasan panti rehab ini, jadi saya daftar secara sukarela”

Berdasarkan data wawancara tersebut bahwa Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba Sekar Mawar menerima dua jenis pasien, yaitu yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk menjalankan program rehabilitasi dan yang mendaftarkan diri berdasarkan putusan hukum.

2. Tahap Awal Penilaian.

Tahapan ini dilakukan sebelum memulai rehabilitasi rawat jalan yang bertujuan sebagai langkah atau proses awal untuk memahami kondisi pasien akibat dari mengkonsumsi narkotika, kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan fisik dan mental begitupula menentukan rencana perawatan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran pasien perihal seberapa serius dan seberapa parah masalah yang dihadapi pasien sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Bambang selaku Kepala Rumah Tangga Yayasan:

“Sesudah melewati tahap pendaftaran awal selanjutnya pasien akan dicek fisik dan mentalnya pakai beberapa metode salah satunya wawancara dan penilaian, semua itu dilakukan agar proses pemulihannya bisa berjalan efektif dan tepat.”

Mas AI menjelaskan pemeriksaan lanjutan setelah proses pendaftaran:

“Sesudah proses pendaftaran saya diarahkan keruangan untuk dicek dari mulai fisik terlebih dulu, setelah itu ada wawancara.”

Berdasarkan data wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tahap awal penilaian dilakukan sebagai langkah awal untuk menetapkan perawatan apa yang sesuai agar pasien dapat menjalankan proses pemulihan dengan efektif dan efisien.

3. Tahapan Rencana Perawatan.

Tahapan ini merupakan pilihan bagi pasien untuk menentukan perawatan apa yang akan dijalani, tahap ini dirancang untuk membantu pasien agar terlepas dari rasa kecanduan mengkonsumsi narkotika, tahapan ini memiliki beberapa proses didalamnya yaitu konferensi kasus, penyusunan rencana terapi, intervensi medis dan psikososial yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jika pasien memilih untuk melakukan perawatan rehabilitasi rawat jalan maka pasien akan dirawat sesuai dengan kaidah SMART (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, and Time Bound*) atau kerangka kerja perawatan dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu (Gumiyarna, 2021). Kaidah tersebut membantu pasien agar tetap fokus pada pemulihan disela-sela kesibukan yang sedang dijalani sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Bambang selaku Kepala Rumah Tangga Yayasan:

“Jika tahap penilaian awal sudah dijalani oleh pasien, masuklah ke tahap rencana perawatan yang mau dijalankan oleh pasien, tahap ini memudahkan pasien untuk menjalani proses pemulihan, disisi lain tim petugas yayasan akan menyusun rencana perawatan yang dipilih oleh pasien agar berjalan dengan baik diantaranya konferensi kasus, menyusun rencana terapi, intervensi medis dan psikososial, dan lainnya.”

Mas AI menjelaskan perawatan yang ia pilih:

“saya sewaktu milih rehabilitasi agak bingung karena kalau rawat inap kan saya juga perlu uang untuk menghidupi keluarga saya apalagi ada pekerjaan yang harus saya penuhi kewajibannya, akhirnya saya pilih rehabilitasi rawat jalan biar bisa beraktifitas diluar juga.”

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap ini merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh pasien untuk menjalankan program rehabilitasi atau pemulihan dan juga memberikan kebebasan kepada pasien untuk memilih, disisi lain tim petugas yayasan akan melakukan berbagai upaya agar pemulihan pasien dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

4. Tahap Pemantauan Penggunaan Narkotika. (Penilaian Lanjutan)

Tahap ini dilakukan pada saat menjalankan program rehabilitasi rawat jalan untuk melakukan pemantauan yang bertujuan untuk evaluasi setiap rencana terapi yang diberikan agar berjalan dengan efektif dan efisien, penilaian ini merupakan tahapan terpenting karena hasil dari pemantauan dapat melihat perkembangan kualitas hidup dari diri pasien secara detail (Jamaruddin & Sudirman, 2022). Mekanisme yang dilakukan oleh Yayasan Panti Rehabilitasi Narkotika Sekar Mawar adalah proses monitoring untuk memantau efektivitas perkembangan kualitas hidup pasien, hal tersebut dilakukan secara berkala melalui tes urine yang dimasukkan pada rekam medis elektronik khusus rehabilitasi untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pemulihan agar proses pemulihan efektif dan efisien (Jayanti & Sugirasi, 2024). Adapun proses evaluasi psikolog yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dapat mencapai target pemulihan agar tetap termotivasi untuk pulih total, dan yang terakhir adalah mekanisme koping yang diterapkan kepada pasien secara berkala agar dapat terus meningkatkan efektifitas dan mendukung kemajuan pemulihan dari pasien agar tidak menggunakan kembali narkotika sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Bambang selaku Kepala Rumah Tangga Yayasan:

“Setelah tahap rencana perawatan dan perawatannya sudah dipilih oleh pasien, lanjut ke proses pemantauan atau penilaian lanjutan disebutnya, proses ini penting untuk meninjau pasien secara keseluruhan dilihat dari kondisi fisiknya, mentalnya, sama lingkungan pasien karena perlu membatasi lingkungan yang

memberikan pengaruh buruk atau negatif bagi kelangsungan pemulihan pasien. Proses peninjauan dilakukan berkala bagi pasien melalui tes urin agar dapat melihat hambatan yang kira-kira muncul apa agar tim petugas yayasan bisa mengambil tindakan supaya proses pemulihan tidak keluar dari rencana awal.”

Mas AI menjelaskan proses penilaian lanjutan:
“saya pada saat menjalani proses rehabilitasi rawat jalan memang dicek secara berkala oleh petugas dari panti kadang juga menanyakan perihal lingkungan pertemanan dan juga buat sekalian ambil sampel urin.”

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap pemantauan dilakukan untuk menilai dan evaluasi proses pemulihan agar sesuai dengan yang direncanakan oleh tim petugas yayasan.

5. Tahap Pasca Rehabilitasi.

Dalam tahap ini pasien harus memiliki kesiapan karena tim petugas yayasan akan melakukan pengukuran indikator pemulihan pada pasien selama menjalani rehabilitasi rawat jalan yang memiliki tujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi yang telah diterima oleh pasien, hal ini dilakukan melalui tiga aspek diantaranya aspek keluarga, aspek petugas, dan aspek pasien (Ayu, 2019). Sebelum dimulainya tahap pasca rehabilitasi akan dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan urin, pemeriksaan kualitas hidup, dan pemeriksaan pengukuran motivasi untuk pulih dari efek kecanduan narkotika. Penilaian tersebut menjadi parameter bagi pasien untuk menjalankan program pasca rehabilitasi, hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan pasien agar meningkatkan pemulihan dan kualitas hidup. Tahapan pasca rehabilitasi jika pasien telah dinyatakan dapat menjalankan program tersebut akan dilakukan selama 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu meliputi kegiatan pemantauan dan pendampingan pemulihan (Ayu, 2019). Hal tersebut dilakukan dengan cara observasi kegiatan keseharian pasien dalam menjalankan kesibukannya, observasi mengumpulkan data yang meliputi informasi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Pemantauan dan pendampingan

pemulihan hanya terfokus pada penyediaan akses fasilitas yang membantu reintegrasi pasien ke masyarakat, ketika seluruh rangkaian program telah selesai maka akan dilakukan evaluasi akhir dan memasuki tahap terminasi sebagai akhir dari program rehabilitasi rawat jalan sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Bambang selaku Kepala Rumah Tangga Yayasan:

“Sesudah tahap pemantauan dan berjalan dengan baik proses pemulihannya lanjut ke tahap persiapan pasca rehabilitasi, kegiatan yang dilakukan itu adalah penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien apakah efektif, penilaian yang dilakukan oleh tim petugas yayasan itu ada tiga aspek diantaranya penilaian dari keluarga yaitu kegiatan pasien sehari-hari itu ngapain aja, penilaian dari petugas yaitu perilaku yang dilakukan pasien saat menjalani perawatan seperti apa, dan terakhir penilaian dari pasien yaitu pemberian motivasi, wawasan soal kualitas hidup sekaligus pengukuran kualitas hidup pasien agar dapat dinyatakan siap menjalani proses pasca rehabilitasi. Proses pasca rehabilitasi ini merupakan proses akhir bagi pasien atau finishing soalnya hanya perlu untuk memberikan tugas kepada pasien yang melibatkan unsur keluarga dan dibantu oleh psikolog untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara menyeluruh dan memberikan fasilitas yang sesuai contohnya latihan keterampilan salah satunya, proses ini dilakukan selama satu atau dua bulan.”

Mas AI menjelaskan persiapan dan proses pasca rehabilitasi yang dijalani:

“Ohh... persiapan proses pasca rehabilitasi rawat jalan itu saya dikabarin oleh pihak yayasan untuk wawancara, keluarga juga dipanggil buat wawancara, ada juga persiapannya itu saya bisa dapet latihan keterampilan atau tugas yang dikasih dari pihak yayasan katanya untuk penilaian supaya bisa menjalani proses pasca rehabilitasi.”

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pasca rehabilitasi harus melakukan persiapan terlebih dahulu dengan menilai pasien melalui tiga aspek

diantaranya wawancara kepada keluarga, petugas, dan pasien. Setelah penilaian tersebut selesai jika pasien dinyatakan lulus, maka pasien dapat menjalani proses pasca rehabilitasi selama satu sampai dengan dua bulan dengan bantuan dari psikolog agar memberikan kebutuhan yang diinginkan oleh pasien salah satunya pelatihan keterampilan.

6. Tahap Terminasi Program.

Tahap akhir dari seluruh rangkaian program rehabilitasi rawat jalan, tahap ini akan melaksanakan beberapa proses yaitu melakukan evaluasi perkembangan pasien dengan menggunakan alat tes urin, WHO-QoL, BREF, dan URICA (Hidayah, Lubis, & Simanjuntak, 2023). Selanjutnya akan memproses penerbitan surat keterangan selesai rehabilitasi oleh kepala Yayasan Panti Rehabilitasi Narkotika Sekar Mawar yang ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang kemudian diterbitkan kepada pasien, dapat disimpulkan bahwa tahapan terminasi merupakan berakhirnya masa rehabilitasi rawat jalan yang ditandai dengan kegiatan administrasi penerbitan surat keterangan selesai rehabilitasi oleh kepala Yayasan Panti Rehabilitasi Narkotika Sekar Mawar yang ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang kemudian diterbitkan kepada pasien sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Bambang selaku Kepala Rumah Tangga Yayasan:

“Pasca rehabilitasi itu proses menuju paling akhir dalam program yaitu tahap terminasi, tahap terminasi ini meliputi kegiatan evaluasi perkembangan pemulihan pasien melalui tes urin, WHO-QoL, BREF, dan URICA sebagai syarat penerbitan surat keterangan bebas narkoba nantinya.”

Mas AI menjelaskan proses akhir tahap terminasi:

“Sewaktu selesai rehab kan harus ngajuin penerbitan surat bebas narkoba, itu harus ikut beberapa tes dulu sebagai syarat diterbitkan suratnya”

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap terminasi merupakan rangkaian kegiatan yang paling terakhir bagi

pasien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi dengan dibuktikan melalui penerbitan surat keterangan bebas narkoba, hal tersebut menandakan pasien dapat kembali beraktivitas seperti biasa dengan khalayak umum tanpa adanya sanksi sosial dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan merupakan program yang diinisialkan untuk mereka para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sudah memiliki pekerjaan atau memiliki keluarga dan anak atau bagi mereka yang menjalani program wajib belajar. Penyajian modul-modul tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan program rehabilitasi rawat jalan sangat diperlukan melihat agar pasien pada saat proses pemulihan akan optimal sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat dan tidak lagi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika (Mayasari et al., 2024).

Rehabilitasi rawat jalan diselenggarakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang menjelaskan bahwa “Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintahan, pemerintah daerah, atau masyarakat.”. dengan adanya peraturan tersebut maka tidak hanya pemerintah yang dapat menyelenggarakan program rehabilitasi rawat jalan tetapi melibatkan unsur masyarakat atau swasta sebagai pelengkap atau mitra dalam menyempurnakan program tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, layanan rehabilitasi rawat jalan dapat diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan, seperti layanan rehabilitasi rawat jalan Badan Narkotika Nasional yang dapat diselenggarakan berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi

Berkelanjutan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis institusi meliputi Rawat Jalan. Dalam segi hukum positif Indonesia regulasi mengenai penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan sah dilakukan baik oleh pemerintahan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tidak adanya sedikitpun larangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan, namun dalam penelitian ini efektivitas dan efisien dalam penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan sudah sangat baik dilihat dari temuan penelitian dan proses wawancara yang telah dilakukan program rehabilitasi rawat jalan memiliki tujuan yang positif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbatasan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Rawat Jalan

Pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menyelenggarakan program rehabilitasi rawat jalan memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis institusi meliputi Rawat Jalan, dengan demikian pemerintah dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi rawat jalan. Namun, dalam penyelenggaraannya pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan program tersebut sehingga pemerintah wajib kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tim dokter dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan (Suitrisno et al., 2025). Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah terdapat pada jarak yang terlampau jauh dari rumah pasien ke tempat rehabilitasi walaupun masih dapat teratasi oleh media elektronik namun dalam penyelenggaraan program tersebut menghabiskan anggaran biaya yang banyak begitu pula bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan program rehabilitasi rawat jalan yang bertujuan untuk refungsionalisasi

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan masyarakat.

Program rehabilitasi rawat jalan disosialisasikan oleh pemerintah melalui program penyuluhan yaitu Desa Bersinar dengan target audiensi ke berbagai komunitas diantaranya sekolah-sekolah, desa-desa, pabrik, dan pihak swasta (Sianipar, Qur'ainny, & Julian, 2025). Pada penyelenggaraan program rehabilitasi rawat jalan memiliki beberapa catatan penting terkait kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung upaya penyelenggaraan rehabilitasi rawat jalan ini. Pemerintah mewajibkan bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengalokasikan anggaran untuk program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN untuk membantu pelaksanaan sosialisasi program rehabilitasi rawat jalan melalui penyuluhan Desa Bersinar. Disisi lain keterbatasan pemerintah dalam mensosialisasikan penyelenggaraan program rehabilitasi rawat jalan yaitu tidak adanya kesanggupan dari pemerintah untuk memperluas jangkauan program rehabilitasi rawat jalan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan seseorang yang terindikasi mengkonsumsi narkotika, hal tersebut menjadi tantangan dalam keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

Di Bandung upaya dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya melalui penegakan hukum adapula opsi lain yaitu melalui pendekatan program rehabilitasi rawat jalan (Eka, 2023). Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah dapat melakukan pendekatan melalui sosialisasi program Desa Bersinar sembari memperkenalkan program layanan rehabilitasi rawat jalan kepada sekolah-sekolah, desa-desa, pabrik, dan pihak swasta sebagai upaya dari keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada penelitian ini keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah tidak lebih dari permasalahan anggaran yang

disediakan oleh pemerintah pusat, namun dengan adanya beberapa program yang dapat bersinergitas dengan kalangan masyarakat terutama dengan kalangan mahasiswa terkait salah satu nilai tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian terhadap masyarakat, program penyuluhan yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu Desa Bersinar dapat dioptimalisasikan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah tidak menjadi hambatan yang signifikan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan program rehabilitasi rawat jalan pada Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba Sekar Mawar berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh memiliki antusiasme yang baik bagi masyarakat setempat, dengan layanan yang ditawarkan sangat memudahkan para pasien untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari sembari melakukan pemulihan dari kecanduan narkotika, kualitas hidup yang dirasakan oleh pasien meningkat secara drastis setelah menjalankan tahap pasca rehabilitasi sehingga program rehabilitasi rawat jalan merupakan program pemulihan yang sangat efektif dan efisien.

Dalam penyelenggaraan program rehabilitasi rawat jalan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah adalah terkait keterbatasan anggaran dalam proses sosialisasi program rehabilitasi rawat jalan kepada masyarakat umum yang berlokasi jauh dari tempat rehabilitasi narkotika, namun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah bersinergi dengan masyarakat umum, komunitas, atau mahasiswa dengan mempertimbangkan nilai tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian terhadap masyarakat untuk berkolaborasi dengan program Desa Bersinar sembari mensosialisasikan program rehabilitasi rawat jalan.

REFERENSI

Asmawati, Mahendika, D., Putri, A., Rino, A., Vanchapo, & Amri, N. (2024). Efektivitas Rehabilitasi Rawat Jalan Terhadap Kualitas

Hidup Pengguna Narkotika. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

Aulianita, R. (2022). Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Di Klinik IPWL Badan Narkotika Nasional. *JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas)*, 7(1), 48–61.

<https://doi.org/10.32767/jutim.v7i1.1557>

Ayu, D. (2019). Program Pelatihan Sebagai Upaya Pemberdayaan Korban Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Damping Borneo BNN RI Samarinda. *Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.30872/ls.v1i1.255>

Eka, N. (2023). Program Konselor Adiksi pada rehabilitasi terhadap pemulihan pecandu Narkoba: Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung Jalan Cianjur No.4 Kelurahan Kacapring Kecamatan Batununggal. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/77131>

Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406–417. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v2i5.333>

Gumiyarna, H. (2021). Gambaran Kesiapan Klien Penyalahguna Narkoba Dalam Menghadapi Terapi Rehabilitasi Melalui Instrumen Urica Di Klinik Pratama BNN Kota Cimahi. *Jurnal Kesehatan Kartika*, 16(3), 1. <https://doi.org/10.26874/jkkes.v16i3.190>

Herawati, H. (2023). Analisis Kualitas Hidup Pasien Program Rehabilitasi Rawat Jalan di BNN Kota Cimahi. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8014660>

Hidayah, F., Lubis, Z., & Simanjuntak, J. S. B. P. (2023). Perilaku Sosial Pasien Rawat Jalan Dalam Ketergantungan Narkotika. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.63878>

- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Husmiati. (2020). *Laporan penelitian kompetensi pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial di balai/loka pada era tatanan baru* (Cetakan I). Jakarta: Puslitbang Kesos, Kemensos RI, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Jamaruddin, J., & Sudirman, S. (2022). Dimensi Pengukuran Kualitas Hidup Di Beberapa Negara. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1), 51–63. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2640>
- Jayanti, A., & Sugiarsi, S. (2024). Pengembangan Modul Rekam Medis Elektronik (RME) Rehabilitasi Medik Rawat Jalan. *J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 5(1). <https://publikasi.polije.ac.id/j-remi/article/view/4890/2712>
- Mayasari, F. K. D., Erza, E. S., Nurhotimah, & Saprina, I. M. (2024). Analisis Kualitas Hidup P2K Narkotika pada Penerima Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan BNN Tahun 2022. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 6(1), 56–72. <https://doi.org/10.51486/jbo.v6i1.195>
- Mirianty, W. (2021). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Klien Drop Out dari Program Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i1.10049>
- Nurbaliza, V., Dewi, S., & Abas, M. (2024). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang)*. 6(1). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1952>
- Rizki, F. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1). <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/940#>
- Sianipar, G. S. N., Qur'ainny, A., & Julian, D. M. (2025). Keterbatasan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Menangani NAPZA melalui Rehabilitasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6723>
- Suitrisno, G., Amiq, B., & Yustino. (2025). Implementasi Fasilitas Rehabilitasi Medik Bagi Pengguna Narkotika di BNN Kota Mojokerto. 2(1), 216–228. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.176>
- Tanjung, I. M., & Aulia, N. (2025). Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberantas Narkotika Dan Upaya Rehabilitasi. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Teologi*, 03(01). <https://ourhope.biz.id/ojs/index.php/JP/article/view/68>
- Wanda Utanty & Ayuning Atmasari. (2024). Gambaran Proses Rehabilitasi Pada Remaja Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Psimawa*, 7(1), 120–125. <https://doi.org/10.36761/jp.v7i1.3716>